



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jl.Ir. Soekarno No. 58 Muara Jawa Ulu

Nomor : B. /000/SET.CMJ.KEU/7/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Risiko dan Pelaksanaan
Rencana Tindak Pengendalian
(RTP) Risiko Triwulan II Tahun
2024 Kecamatan Muara Jawa.-----

Muara Jawa, 15 Juli 2024

Yth. Bupati Kutai Kartanegara

di

Tenggarong

Dengan ini kami sampaikan Laporan Risiko dan Pelaksanaan RTP Risiko Triwulan II Tahun 2024 dengan dokumen terlampir.



Kepala Perangkat Daerah

MUHAMMAD RAMLI.,S.E.,M.M.

Pembina /IV.a

Nip. 19750604 200012 1 003

Tembusan Kepada Yth

1. Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**
2. Asisten Bidang (.....sesuai dengan asisten yang membawahi Perangkat daerah) Selaku Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**
3. Inspektorat selaku Unit Pengawasan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
UNIT PENGELOLA RISIKO KECAMATAN MUARA JAWA
TRIWULAN II TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 Pasal pada pasal 13 disebutkan pada ayat (1) “ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a) identifikasi Risiko, dan analisis Risiko; (3) Dalam rangka Penilaian Risiko Sebagaimana pada ayat (1); Pimpinan Instansi Menetapkan: a) Tujuan Instansi pemerintah; b) Tujuan pada tiap tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Kecamatan Muara Jawa telah melaksanakan penilaian risiko tahun 2023 dan hasil penilaian risiko telah dilaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Desember 2022 yang selanjutnya diimplemetasikan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) Kecamatan Muara Jawa sesuai dengan rencana tindak pengendalian Risiko yang telah disusun dan hasil pelaksanaan pegelolaan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berkala oleh UPR kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Risiko Kecamatan Muara Jawa sesuai dengan amanat Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada pasal 22 ayat (1) “Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko”. Ayat (2) Laporan Pengelolaan Risiko pada ayat (1) meliputi a. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko; b. Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan c. Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan. Selanjutnya ayat (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup b. dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan. Selanjutnya ayat (7) “Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional dikoordinasikan oleh tingkat pejabat pimpinan tinggi, Selanjutnya dalam lampiran III, Kegiatan pelaporan

pengelolaan Risiko dilakukan pada tingkat perangkat daerah yaitu laporan Risiko dan pelaksanaan RTP pada tingkat strategis (entitas perangkat daerah) dan operasional yang ditangani perangkat daerah, berupa laporan triwulan, tahunan, serta laporan evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan kegiatan pengendalian setiap triwulan dan tahunan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pelaporan ini, Kecamatan Muara Jawa sebagai UPR strategis perangkat daerah dan Camat selaku UPR Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Operasional Kecamatan Muara Jawa disampaikan Laporan berkala hasil pelaksanaan pengelolaan Risiko (Triwulan I) Tahun 2024 kepada Bupati Kutai Kartanegara, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis dan operasional dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan pemerintah daerah.

1.2 Tujuan Pelaporan Pengelolaan Risiko:

Tujuan pelaporan Pelaporan Pengelolaan Risiko Kecamatan Muara Jawa sebagai berikut:

1. Memberikan informasi hasil identifikasi, analisis dan rencana tindak pengendalian Risiko, (RTP) Risiko sasaran strategis, program dan kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah tahun 2024
2. Memberikan informasi kejadian risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan sasaran strategis, program dan kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah Triwulan II
3. Memberikan informasi tentang tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko sebagai indikator peringatan dini dan sebagai bahan data base keterjadian risiko.
4. Memberikan informasi mengenai kendala/hambatan pelaksanaan pengendalian risiko dan risiko sisa setelah pelaksanaan pengendalian Triwulan II
5. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintahj Daerah dalam penanganan risiko lebih lanjut atas kejadian risiko sisa (*residual Risk*) Triwulan II.

1.3 Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 7):
5. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Pengelolaan Risiko Kecamatan Muara Jawa pada pelaksanaan pengelolaan risiko Risiko strategis dan Risiko operasional sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Muara Jawa

BAB II

PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

2..1 Konteks Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Konteks Manajemen Risiko mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sasaran, Program dan Kecamatan Muara Jawa yaitu:

a. Visi dan Misi Inspektorat

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan Visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut:

- 1) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani
- 2) Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya
- 3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

b. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan, Indikator Tujuan dan target tujuan Kecamatan Muara Jawa sesuai Tabel berikut:

Tabel
Indikator Tujuan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif Efisien Inovatif Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	64 Nilai

Sasaran strategis, indikator dan target tahun 2024 sesuai Tabel berikut:

Tabel

Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama dan Target

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	65 Persen
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84 Persen

c. Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tahun anggaran 2024 telah ditetapkan program, kegiatan/sub kegiatan dengan indikator hasil (*output*) sesuai Tabel berikut:

Tabel

Program, Kegiatan Indikator, Target dan Jumlah Anggaran

No.	Nama Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	1.471.094.000
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen	44.905.000.000
I	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	86 Kegiatan	46.376.094.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	5000 Berkas	1.471.094.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	86 kegiatan	44.905.000.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen	8.324.039.877

II	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	84 Kegiatan	14.056.887.000
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	520 Orang	147.650.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 unit	5.874.237.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	348 Pokmas/ormas	7.885.000.000
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti Lomba	8 Kelurahan	150.000.000
III	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	348 Lembaga	7.027.485.877
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	348 Lembaga	6.877.485.877
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta	16 Lembaga	150.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64 Nilai	810.000.000
IV	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	150.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 laporan	50.000.000
V	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	18 laporan	13.348.968.855

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	86 orang	12.829.928.855
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	15.000.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Laporan	25.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 kali	479.040.000
VI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1017 unit	130.200.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1017 unit	75.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1017 unit	55.200.000
VII	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	86 Orang	300.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	1 unit	10.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	100.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 orang	90.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 jenis	100.000.000
VIII	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 jenis	2.154.145.294

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	68 unit	137.150.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	290 Unit	421.037.300
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 unit	25.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	432.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	168012 Unit	147.757.700
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	2.500.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	5 jenis	25.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	4 kali	30.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	422 Jumlah	848.700.294
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	1000 sistem	50.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan	1 jenis	35.000.000
XII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	3.372.506.012
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	2749 bulan	77.350.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.100.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	2.195.156.012
XI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	177 unit	1.480.186.706
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	22 Unit	444.340.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	1 unit	75.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	95 unit	150.550.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	50 unit	206.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	8 unit	604.296.706
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	33.701.339.867
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	815.000.000

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 Kegiatan	790.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Kegiatan	25.000.000

d. Unit Pemilik Risiko (UPR)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko pada Kecamatan Muara Jawa berdasarkan Surat Keputusan Camat Muara Jawa Nomor: **P.550.1/SET.CMJ/UKK/188.4/04/2024** Tanggal 01 April 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Standar Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel

Susunan Pelaksana Unit Pemilik Risiko/Tim Manajemen Risiko

No.	Jabatan dalam Satgas	Nama/NIP	Jabatan Organik Pada SKPD
1.	Ketua	MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M. NIP 197506042000121003	Camat selaku UPR
2.	Sekretaris	EDY KASianto S.,S.Pd. NIP 197301121998021001	Sekretaris Camat selaku UPR
3.	Anggota Tim Kerja	SYAMSUL BAHRI.,S.E. NIP 197912092001121005	Kasi Pemerintahan selaku UPR
4.	Anggota Tim Kerja	DINA MARIANA,S.E.,M.M. NIP 198401102010012001	Kasi Pemberdayaan dan Masyarakat Desa selaku UPR
5.	Anggota Tim Kerja	RULI HAMBRANI,S.Ag.,M.M. NIP 197411042007011023	Kasi Ketentraman dan Ketertiban selaku UPR
6.	Anggota Tim Kerja	ROHANA, S.Sos NIP 196707121986022001	Kasi Kesejahteraan Sosial selaku UPR
7.	Anggota Tim Kerja	Hj. NORJANAH,S.Sos. NIP 197006142000122004	Kasi Pelayanan Umum selaku UPR
8.	Asesor	NILA IRMAWATI,S.Mn. NIP 197608042003122007	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan selaku UPR

9.	Asesor	AKMIDATUL MUSLIMAH,A.Md. NIP 198808192011012002	Kasubbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian selaku UPR
10.	Asesor	NOOR HASANAH NIP 198209052007012013	Pengelola Data Seksi Pelayanan Umum
11.	Asesor	MAWARNI NIP 198511022010012013	Pengelola Data Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tugas Unit Pemilik Risiko (UPR)/Tim Satgas Manajemen Risiko Kecamatan Muara Jawa adalah:

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian Risiko.

2.2. Pengendalian Intern Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko Kecamatan Muara Jawa telah disusun Kriteria Efektivitas Pengendalian Intern pada Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Tabel
Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Deskripsi	Kriteria		Keefektifan
	Desain	Operasional	
Kontrol bersifat preventif, dapat dioperasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Perlu dipantau karena terpengaruh perubahan kondisi	Ya	Ya	Efektif
Kontrol mencakup sebagian dari kebutuhan. Jika desain bagus operasional sebagian	Ya Tidak	Tidak Ya	Sebagian efektif
Baik desain maupun operasional dari kontrol yang ada tidak memadai. Perlu didesain ulang untuk perbaikan atau ganti baru.	Tidak	Tidak	Tidak efektif.

b. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri 3 komponen, yaitu skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko, skala dampak risiko, dan skala tingkat risiko (nilai risiko).

c. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Tabel
Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 5 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 5 Tahun)

d. Skala Dampak Risiko

Tabel
Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara $\leq$ Rp1 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke	Pencapaian target kinerja $\geq$ 100%	Pelayanan tertunda $\leq$ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum $\leq$ 5 kali dalam
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp1 Juta s.d Rp5 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp5	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 50	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja $\leq$ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali

e. Skala Penerimaan Nilai Risiko

Tabel
Skala Nilai Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko (<i>Risk Appetite</i>)
1-2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
20-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik
Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko (<i>Risk Tolerance</i>)
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima

6-10 (Rendah)	Dapat diterima
11-15 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
16-20 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
21-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

f. Kriteria Tingkat Risiko

Gambar
Matriks Tingkat Risiko

Matriks Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Pengelompokan Prioritas Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel
Pengelompokan prioritas Tingkat Risiko

Skala	Warna	Tingkat	Prioritas
1 -5	Hijau	Rendah	5
6 – 8	Hijau Muda	Rendah sedang	4
9 – 12	Kuning	Sedang tinggi	3
15 – 20	Jingga	Tinggi	2
20 - 25	Merah	Sangat Tinggi	1

g. Kriteria Tingkat Risiko Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel
Pemetaan Tingkat Risiko, selera Risiko, Toleransi Risiko dan Eskalasi Tindakan

Tingkat Risiko	Selera Risiko	Toleransi Risiko	Tindakan Eskalasi
Sangat Tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan responsif.	Risiko tidak dapat diterima dan ditoleransi dan perlakuan risiko perlu dikaji ulang untuk perbaikan atau penambahan	Perlu perhatian Dewan Pengawas organisasi dan Pengendalian dapat dieskalasi ke pimpinan organisasi dan didukung dengan rencana penanganan terinci.

Tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian baik preventif maupun respoatif.	perlakuan atau ganti yang baru.	Perlu perhatian pimpinan organisasi, pengendalian eskalasi kepemimpinan manajemen senior organisasi dan didukung rencana rinci
Sedang tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan preventif.		Pengendalian dieskalasi ke manajer senior selaku pemilik risiko dan didukung dengan rencana rinci.
Sedang rendah		Risiko tidak dapat diterima, namun perlakuan pengendalian hanya dilakukan jika manfaat yang diterima lebih besar dari biayanya	Risiko tidak dapat diterima tapi dapat ditoleransi sepanjang secara praktek menguntungkan.	Pengendalian cukup dengan Manajer Bidang sesuai dengan kebijakan dan SOP yang berlaku.
Rendah		Risiko dapat diterima sehingga tidak perlu perlakuan, cukup kontrol yang ada, tapi perlu dimonitor oleh pemilik risiko.	Risiko dapat diterima dan ditoleransi sehingga tidak perlu perlakuan, cukup dengan kontrol yang ada dan dimonitor oleh pemilik risiko.	Pertahankan pengendalian yang ada dan monitor tingkat keterjadian risiko untuk perlakuan risiko.

BAB III

HASIL PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO

3.1 Unit Pemilik Risiko Eselon III

3.1.1 Camat Muara Jawa

Nama Pejabat : MUHAMMAD RAMLI.,S.E.,M.M.

NIP : 19750604 200012 1 003

a. Sasaran strategis yang dikelola eselon III

Sasaran Strategis Eselon III sesuai Tabel berikut:

Tabel
Sasaran Strategis, Indikator, Target dan anggaran UPR Eselon III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	65 Persen	-
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84 Persen	-

b. Identifikasi Risiko Strategis

Hasil Identifikasi Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	64	89.211.473.744	RTMJ01	Petugas pelayanan kurang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Belum adanya pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Paten	Internal	Control	Pelayanan tidak maksimal	CAMAT
1	Sasaran : Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	65	55.510.133.877	RSMJ01	Fasilitas Pelayanan belum terpenuhi	Keterbatasan anggaran	Internal	Control	Pelayanan tidak maksimal	CAMAT
					RSMJ02	Sarana dan Prasarana penunjang masih tergantung pada dinas lain	Keterbatasan pasokan logistik pelayanan dari Dinas Pengampu	Eksternal	Uncontrol	Pelayanan tidak maksimal	CAMAT
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84	33.701.339.867	RSMJ03	Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat atas aturan hukum dan peraturan/perundangan	Eksternal	Uncontrol	Keadaan tidak kondusif	CAMAT

c. Analisa Risiko Strategis

Hasil Analisis Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil Analisis Risiko

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RTMJ01	Petugas pelayanan kurang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disebabkan oleh Belum adanya pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Paten	4	4	16	Tinggi	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara	Memadai	Efektif	Ada
RSMJ01	Fasilitas Pelayanan belum terpenuhi disebabkan oleh Keterbatasan anggaran	2	3	6	Rendah	Surat Edaran Pemkab tentang Usulan RKBMD/RKPBMD	Memadai	Tidak Efektif	Ada
RSMJ02	Sarana dan Prasarana penunjang masih tergantung pada dinas lain disebabkan oleh Keterbatasan pasokan logistik pelayanan dari Dinas Pengampu	3	3	9	Sedang Tinggi	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara/SOP dan Permohonan Penambahan Anggaran	Memadai	Tidak Efektif	Ada
RSMJ03	Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat disebabkan oleh Kurangnya pemahaman masyarakat atas aturan hukum dan peraturan/perundangan	3	4	12	Sedang Tinggi	Surat Keputusan Kapolri Nopol SKEP/737/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi Penerapan Model Polisi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri sebagai salah satu dasar pengendalian trantibum di Kecamatan	Memadai	Tidak Efektif	Ada

d. Hasil Evaluasi Risiko Strategis eselon III sebagai berikut:

Tabel
Hasil Evaluasi Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Skor	Kategori/ peringkat risiko	Perlakuan Risiko (Diterima / mitigasi, dihindari dan ditransfer)	Status Risiko setelah ada Penanganan (Risk After Mitigation)			
					Kemungkinan (Likelihood)	Dampak (Impact)	Skor	Level Risiko
RTMJ01	Petugas pelayanan kurang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disebabkan oleh Belum adanya pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Paten	16	Tinggi	Mitigasi	2	2	4	Rendah
RSMJ01	Fasilitas Pelayanan belum terpenuhi disebabkan oleh Keterbatasan anggaran	6	Rendah	Mitigasi	2	2	4	Rendah
RSMJ02	Sarana dan Prasarana penunjang masih tergantung pada dinas lain disebabkan oleh Keterbatasan pasokan logistik pelayanan dari Dinas Pengampu	9	Sedang Tinggi	Mitigasi	2	2	4	Rendah
RSMJ03	Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat disebabkan oleh Kurangnya pemahaman masyarakat atas aturan hukum dan peraturan/perundangan	12	Sedang Tinggi	Mitigasi	2	2	4	Rendah

e. Pemetaan Penanganan Risiko Strategis

Gambar
Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Strategis

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

		1	2	3	4	5
	Dampak					

- f. **Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada sasaran Strategis**
Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan eselon III sesuai dengan Tabel berikut:berikut:

Tabel 3.5
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan Risiko (Diterima / mitigasi, dihindari dan ditransfer)	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Target Waktu (Rencana Jadwal RTP)	Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)
RTMJ01	Petugas pelayanan kurang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disebabkan oleh Belum adanya pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Paten	Mitigasi	1. Koordinasi dan penyampaian usulan Diklat dan Bimtek untuk peningkatan kompetensi SDM PATEN	Maret	Kasubag UKK
RSMJ01	Fasilitas Pelayanan belum terpenuhi disebabkan oleh Keterbatasan anggaran	Mitigasi	Usul kebutuhan sarana dan prasarana dalam RKBMD/RKPBMD	Agustus & Desember	Kasi yanmum
RSMJ02	Sarana dan Prasarana penunjang masih tergantung pada dinas lain disebabkan oleh Keterbatasan pasokan logistik pelayanan dari Dinas Pengampu	Mitigasi	Usul kebutuhan pasokan logistik kepada OPD Pengampu	Januari - Desember	Kasi Pemerintahan
RSMJ03	Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat disebabkan oleh Kurangnya pemahaman masyarakat atas aturan hukum dan peraturan/perundangan	Mitigasi	Koordinasi antar instansi terkait sosialisasi dan penanganan trantibum di Kecamatan	Januari - Desember	Kasi Ketermtraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.6
Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Respon Risiko (Diterima / mitigasi, dihindari dan ditransfer)	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Target Waktu (Rencana Jadwal RTP)	Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)
RPMJ01	SOP Pelayanan belum dilaksanakan secara maksimal disebabkan oleh Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan SOP	Mitigasi	1. Nota Dinas kepada setiap petugas PATEN untuk melaksanakan SOP PATEN; 2. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala Setiap Semester	Juni dan Desember	Kasi Pelum & Kasi Pemerintahan
RPMJ02	Rusak/kurang baiknya Jalan dan Jembatan Penghubung Antar Kelurahan disebabkan oleh Kurang identifikasi kondisi sarana dan prasarana / infrastruktur dasar di Kecamatan	Mitigasi	Identifikasi kondisi infrastruktur dasar di Kecamatan	Juni-Agustus	Kasi PMD
RPMJ03	Tidak terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan disebabkan oleh Kurangnya komunikasi dan koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Kecamatan/Kelurahan dengan OPD lain dan pihak swasta	Mitigasi	Koordinasi lintas sektoral untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Maret	Kasi PMD
RPMJ04	Data Pendukung Yang Digunakan Dalam Penilaian SAKIP kurang disebabkan oleh 1. Kegiatan tidak terlaksana; 2. Kegiatan yang terlaksana tidak terdokumentasi	Mitigasi	1. Nota dinas kepada setiap PPTK untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan; 2. Nota dinas kepada setiap PPTK untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan; 3. Pembuatan SOP Pengumpulan Data Kinerja	Januari - Desember	Sekcam
RPMJ05	Rendahnya kompetensi SDM petugas pelayanan umum dalam memberikan pelayanan disebabkan oleh Kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM	Mitigasi	1. Usulan diklat dan bimtek ke BKPSDM	Maret	Kasubag Umum

Tabel 3.7 Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Respon Risiko (Diterima /mitigasi ,dihindari dan ditransfer)	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Target Waktu (Rencana Jadwal RTP)	Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)
RPMJ01	Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan SOP disebabkan oleh Internal	Mitigasi	1. Nota Dinas kepada setiap petugas PATEN untuk melaksanakan SOP PATEN; 2. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala Setiap Semester	Juni dan Desember	Kasi Pelum & Kasi Pemerintahan
RPMJ02	Kurang identifikasi kondisi sarana dan prasarana / infrastruktur dasar di Kecamatan disebabkan oleh Internal	Mitigasi	Identifikasi kondisi infrastruktur dasar di Kecamatan	Juni-Agustus	Kasi PMD
RKMJ01	Tidak Ada Sosialisasi Kegiatan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan	Mitigasi	Bersurat Kepada Dinas Terkait Untuk Melakukan Sosialisasi	Juni	Seluruh Kasi Yang Membidangi Pelimpahan Kewenangan
RSKMJ01	Dokumen Non Perijinan Yang Diurus Masyarakat Tidak Terakomodir dan Keluar Tepat Waktu disebabkan oleh Sarana Dan Prasarana	mitigasi	Usul kebutuhan pasokan logistik kepada OPD Pengampu	Januari - Desember	Kasi yanmmum
RSKMJ02	Tidak Terlaksananya Kegiatan Terkait Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan disebabkan oleh Tidak Adanya Kelengkapan Dokumen Dan Proposal Dari Pengusul	Mitigasi	Menginformasikan Kepada Pihak Pengusul Agar Dapat Melengkapi Persyaratan dan Dokumen Serta Proposal dalam hasil verifikasi di aplikasi SIPD	Maret	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
RPMJ03	Kurangnya komunikasi dan koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Kecamatan/Kelurahan dengan OPD lain dan pihak swasta disebabkan oleh Eksternal Uncontrol	Mitigasi	Koordinasi lintas sektoral untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Maret	Kasi PMD
RKMJ02	Kesadaran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan masih rendah	Mitigasi	Sosialisasi ke Kelurahan	Per Triwulan	Kasi PMD dan Kasi Kessos
RSKMJ03	Tidak tersampainya undangan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan kepada Masyarakat disebabkan oleh Undangan tidak tersampaikan secara langsung kepada pihak yang diundang	Mitigasi	Menyampaikan undangan Musrenbang melalui media selain surat undangan	Februari	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
RSKMJ04	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak terlaksana tepat waktu disebabkan oleh Kelangkaan material	Mitigasi	Menginstruksikan kepada PPTK untuk survey ketersediaan material	Mei	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan '- Kasi Pembangunan Kelurahan
RSKMJ05	Tidak terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan disebabkan oleh Kurangnya komunikasi dan koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Kecamatan/Kelurahan dengan OPD lain dan pihak swasta	Mitigasi	Koordinasi lintas sektoral untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Maret	Kasi PMD
RSKMJ06	Terdapat kelurahan yang tidak mengikuti Lomba Kelurahan disebabkan oleh Ketidaksiapan Kelurahan dalam memenuhi syarat-syarat penilaian Lomba Kelurahan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada seluruh Kelurahan untuk mengikuti kegiatan Evaluasi/Lomba Kelurahan	Februari	Kasi PMD

RKMJ03	Kesadaran Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Dalam Kegiatan Pemberdayaan masih rendah	Mitigasi	Monitoring pada Kelurahan dan Desa	April dan September	Kasi PMD, Kasi Pemerintahan
RSKMJ07	Terdapat lembaga kemasyarakatan yang tidak melaksanakan kegiatan disebabkan oleh Kepengurusan tidak aktif	Mitigasi	Mengadakan kegiatan2 yang akan membuat lembaga kemasyarakatan menjadi aktif melaksanakan kegiatan (Lomba RT, Lomba LPM, Lomba Karang	Agustus	Kasi PMD
RSKMJ08	Tidak terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan disebabkan oleh Kurangnya koordinasi lintas sektoral dengan OPD Pengampu untuk memberikan bimtek peningkatan kapasitas lembaga	Mitigasi	Koordinasi lintas sektoral dengan OPD Pengampu untuk pelaksanaan bimtek	Agustus	Kasi PMD
RPMJ04	1. Kegiatan tidak terlaksana; 2. Kegiatan yang terlaksana tidak terdokumentasi disebabkan oleh Internal	Mitigasi	1. Nota dinas kepada setiap PPTK untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan; 2. Nota dinas kepada setiap PPTK untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan; 3.	Januari - Desember	Sekcam
RKMJ04	Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Terlambat Dibuat disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang	Mitigasi	Monitoring Rencana Kerja, Laporan Evaluasi Kinerja Masing-masing Kasi dan Kasubbag Disampaikan Tepat Waktu	Jan - Sep	Sekretaris Camat
RSKMJ09	Dokumen Perencanaan Kecamatan Terlambat Dibuat disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada seluruh pejabat struktural dan pelaksana kegiatan untuk menginventarisir rincian kebutuhan dan biaya yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan disampaikan kepada kasubag program dan	Agustus	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
RSKMJ10	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Terlambat Dibuat disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada seluruh pejabat struktural dan pelaksana kegiatan untuk membuat laporan progres capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bulan	Januari - Desember	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan

RKMJ05	Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Mitigasi	Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Laporan Administrasi Keuangan Oleh Atasan Langsung Sebelum Disampaikan	Januari - Desember	Sekretaris Camat
RSKMJ11	Gaji dan Tunjangan ASN Tidak Dibayarkan Tepat Waktu disebabkan oleh Keterlambatan SPD	Mitigasi	Koordinasi antara Bagian Keuangan dengan BPKAD terkait penyediaan SPD Gaji dan tunjangan	Januari - Desember	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
RSKMJ12	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terhambat disebabkan oleh Terjadi Kesalahan dan Ketidaksesuaian Dikertas Kerja Rekonsiliasi Aset dan Realisasi Keuangan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan agar melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	Juni dan desember	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan serta Pengurus Barang
RSKMJ13	Hasil Pemeriksaan tidak/terlambat ditindaklanjuti disebabkan oleh Terjadi Keterlambatan Dalam Mengumpulkan, Menghimpun dan Menyusun laporan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada pelaksana kegiatan untuk menyerahkan semua data yang dibutuhkan tepat waktu	Januari - Desember	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
RSKMJ14	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terhambat disebabkan oleh Terjadi Keterlambatan Dalam Mengumpulkan, Menghimpun dan Menyusun laporan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada pelaksana kegiatan untuk membuat rekapitulasi/laporan realisasi pembayaran tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekretaris dan Kasubag Program dan keuangan
RKMJ06	Tidak Lengkapnya Dokumen Pengadaan dan Dokumen Pendukung	Mitigasi	Pengurus Barang Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen dan Barang Sebelum Dilakukan Pencatatan	Jan dan Sep	Sekretaris Camat
RSKMJ15	Pengamanan Aset tidak terlaksana disebabkan oleh Kurang koordinasi antara PPK Barang dan Pengurus Barang	Mitigasi	Instruksi Camat kepada PPTK, PPK Barang dan Pengurus Barang	Juli	Kasubag UKK dan Pengurus barang
RSKMJ16	Penatausahaan BMD Tidak Maksimal disebabkan oleh Terjadi Kurang Entry BMD Pada Simda BMD	Mitigasi	Monitoring dan Evaluasi dari Camat	Jan - Des	Kasubag UKK dan Pengurus barang

RKMJ07	Dokumen Pendukung Tidak Lengkap	Mitigasi	Evaluasi Sumber Daya Manusia yang ada sebelum peaksanaan kegiatan	Juni-Des	Sekretaris Camat
RSKMJ17	Kegiatan tidak dilaksanakan/mutu pelaksanaan rendah disebabkan oleh Saprasi yang disediakan tidak sesuai kebutuhan / mutu rendah	Mitigasi	1. Laporan Bulanan Pegawai; 2. Surat Teguran bagi ASN yang melanggar disiplin pegawai	Jan - Des	Kasubag UKK
RSKMJ18	Kegiatan tidak dilaksanakan/mutu pelaksanaan rendah disebabkan oleh 1. Kekurangan anggaran; 2. Kegiatan tidak terlaksana	Mitigasi	Surat tugas kepada pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Diklat	Agustus	Kasubag UKK
RSKMJ19	Kegiatan tidak dilaksanakan/mutu pelaksanaan rendah disebabkan oleh 1. Kekurangan anggaran; 2. Kegiatan tidak terlaksana	Mitigasi	Menyampaikan undangan kepada calon peserta	Agustus	Kasubag UKK
RSKMJ20	Kegiatan tidak dilaksanakan/mutu pelaksanaan rendah disebabkan oleh 1. Kekurangan anggaran; 2. Kegiatan tidak terlaksana	Mitigasi	Surat tugas kepada pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Diklat	Agustus	Kasubag UKK
RKMJ08	Tidak Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Mitigasi	Dilakukan Evaluasi terkait pagu anggaran dengan Standar Harga	Jan-Maret	Sekretaris Camat
RSKMJ21	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan	Mei	Kasubag Umum
RSKMJ22	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan	Mei	Kasubag Umum
RSKMJ23	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan	Mei	Kasubag Umum
RSKMJ24	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan	Mei	Kasubag Umum
RSKMJ25	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan	Mei	Kasubag Umum
RSKMJ26	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan	Mei	Kasubag Umum
RSKMJ27	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan	Mei	Kasubag Umum
RSKMJ28	Kunjungan tamu tidak terjadwal disebabkan oleh Kurangnya koordinasi lintas sektoral	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan	Mei	Kasubag Umum
RSKMJ29	Hasil rapat koordinasi tidak maksimal disebabkan oleh Yang hadir dalam rapat koordinasi tidak sesuai tupoksi	Mitigasi	Nota dinas dari Camat ke seluruh ASN	Mei	Rendah sedang
RSKMJ30	SDM yang menangani kearsipan belum memiliki kompetensi yang cukup disebabkan oleh Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak maksimal	Mitigasi	Urusan ke BKPSDM untuk pelatihan kearsipan	Maret	Kasubag UKK
RSKMJ31	SDM yang menangani Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD belum memiliki kompetensi yang cukup disebabkan oleh Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tidak maksimal	Mitigasi	Urusan ke BKPSDM untuk pelatihan kearsipan	Maret	Kasubag UKK

RKMJ09	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tertunda disebabkan oleh Waktu Penyelesaian Tidak Cukup	Mitigasi	Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian	Jan-Des	Sekretaris Camat
RSKMJ32	Terdapat beberapa surat/korespondensi yang tidak dapat dilengkapi dengan materai disebabkan oleh Persediaan materai kurang	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan	Mei	Kasubag Umum
RSKMJ33	Tidak terbayarnya tagihan air, listrik dan wifi kantor disebabkan oleh Kurang anggaran	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan	Mei	Kasubag Umum
RSKMJ34	Data terkait kehadiran THL terlambat disampaikan disebabkan oleh Petugas pengumpul data terlambat menyelesaikan tugas	Mitigasi	Nota dinas ke Kasubag Kepegawaian untuk melakukan pengumpulan daftar hadir tepat waktu	Mei	Kasubag Kepegawaian
RKMJ10	Lemahya Pengawasan Dan Tidak Adanya Lembar Control Aset Yang Dipelihara	Mitigasi	Membuat Lembar Control Penjagaan Perawatan Aset	Jan, April, Juli, Oktober	Kasubag UKK
RSKMJ35	Kelalaian pembayaran pajak kendaraan operasional disebabkan oleh Pembayaran pajak tidak terjadwal	Mitigasi	Nota dinas ke pengurus barang untuk membuat jadwal pembayaran pajak kendaraan jabatan	Mei	Pengurus barang
RSKMJ36	Pemeliharaan tidak terlaksana disebabkan oleh Kurang anggaran	Mitigasi	Nota dinas ke Bagian Penyusunan Program dan Keuangan untuk menambah anggaran pemeliharaan alat berat	Mei	Kasubag Program dan Keuangan
RSKMJ37	Peralatan kantor tidak berfungsi dengan baik disebabkan oleh Tidak terdapat jadwal khusus untuk pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Mitigasi	Nota dinas ke Pengurus Barang untuk melakukan penjadwalan pemeliharaan alat kantor	Mei	Pengurus barang
RSKMJ38	aset tetap lainnya tidak berfungsi dengan baik disebabkan oleh Tidak terdapat jadwal khusus untuk pemeliharaan aset tetap lainnya	Mitigasi	Nota dinas ke Pengurus Barang untuk melakukan penjadwalan pemeliharaan aset tetap lainnya	Mei	Pengurus barang
RSKMJ39	Pemeliharaan tidak terlaksana disebabkan oleh Kurang anggaran	Mitigasi	Nota dinas ke Bagian Penyusunan Program dan Keuangan untuk menambah anggaran pemeliharaan gedung kantor	Mei	Kasubag Program dan Keuangan
RPMJ05	Kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM disebabkan oleh Internal	Mitigasi	1. Usulan diklat dan bimtek ke BKPSDM	Maret	Kasubag Umum
RKMJ11	Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Yang Kurang Matang	Mitigasi	Melakukan Rapat Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan	Jan sd Des	Kasi Kesejahteraan Sosial Dan Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
RSKMJ40	Ketidaksiapan anggaran untuk mengikuti kegiatan disebabkan oleh Jadwal kegiatan yang belum tentu sehingga tidak sesuai dengan anggaran kas	Mitigasi	Koordinasi dengan Setkab terkait jadwal pelaksanaan kegiatan	Jan sd Des	Sekcam
RSKMJ41	Kegiatan Pimpinan di Kecamatan Yang Cukup Padat Sehingga Tidak Bisa Melaksanakan Forum Koordinasi disebabkan oleh Belum ada koordinasi antar Forkompincam	Mitigasi	Nota dinas kepada Sekcam untuk melakukan koordinasi dengan Forkompincam	Jan sd Des	Sekcam

g. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel 3.8
Pemantauan RTP Risiko Strategis

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksanaan Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Koordinasi dan penyampaian usulan Diklat dan Bimtek untuk peningkatan kompetensi SDM PATEN													Kasubag UKK	CAMAT
Usul kebutuhan sarana dan prasarana dalam RKBMD/RKPMD													Kasi yamum	Camat
Usul kebutuhan pasokan logistik kepada OPD Pengampu													Kasi Pemerintahan	Camat
Koordinasi antar instansi terkait sosialisasi dan penanganan trantibum di Kecamatan													Kasi Keterntaman dan Ketertiban Umum	Camat

Tabel 3.9
Pemantauan RTP Risiko Program

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksanaan Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Nota Dinas kepada setiap petugas PATEN untuk melaksanakan SOP PATEN; 2. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala Setiap Semester													Kasi Pelum & Kasi Pemerintahan	Camat
Identifikasi kondisi infrastruktur dasar di Kecamatan													Kasi PMD	Camat
Koordinasi lintas sektoral untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat													Kasi PMD	Camat
1. Nota dinas kepada setiap PPTK untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan; 2. Nota dinas kepada setiap PPTK untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan; 3. Pembuatan SOP Pengumpulan Data Kinerja													Sekcam	Camat
1. Usulan diklat dan bimtek ke BKPSDM													Kasubag Umum	Camat

Tabel 3.10

RKMJ03	Kesadaran Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Dalam Kegiatan Pemberdayaan masih rendah	Mitigasi	Monitoring pada Kelurahan dan Desa															Kasi PMD, Kasi Pemerintahan	Sekcam
RSKMJ07	Terdapat lembaga kemasyarakatan yang tidak melaksanakan kegiatan disebabkan oleh Kepengurusan tidak aktif	Mitigasi	Mengadakan kegiatan2 yang akan membuat lembaga kemasyarakatan menjadi aktif melaksanakan kegiatan (Lomba RT, Lomba LPM, Lomba Karang taruna, Lomba Posyandu)															Kasi PMD	Kasi PMD
RSKMJ08	Tidak terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan disebabkan oleh Kurangnya koordinasi lintas sektoral dengan OPD Pengampu untuk memberikan bimtek peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatn	Mitigasi	Koordinasi lintas sektoral dengan OPD Pengampu untukpelaksanaan bimtek															Kasi PMD	Kasi PMD
RPMJ04	1. Kegiatan tidak terlaksana; 2. Kegiatan yang terlaksana tidak terdokumentasi disebabkan oleh Internal	Mitigasi	1. Nota dinas kepada setiap PPTK untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan; 2. Nota dinas kepada setiap PPTK untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan; 3. Pembuatan SOP Pengumpulan Data Kinerja															Sekcam	Camat
RKMJ04	Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Terlambat Dibuat disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Mitigasi	Monitoring Rencana Kerja, Laporan Evaluasi Kinerja Masing-masing Kasi dan Kasubbag Disampaikan Tepat Waktu Setiap Bulan															Sekretaris Camat	Sekcam
RSKMJ09	Dokumen Perencanaan Kecamatan Terlambat Dibuat disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada seluruh pejabat struktural dan pelaksana kegiatan untuk menginventarisir rincian kebutuhan dan biaya yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan disampaikan kepada kasubag program dan keuangan															Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
RSKMJ10	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Terlambat Dibuat disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada seluruh pejabat struktural dan pelaksana kegiatan untuk membuat laporan progres capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bulan															Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
RKMJ05	Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Mitigasi	Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Laporan Administrasi Keuangan Oleh Atasan Langsung Sebelum Disampaikan															Sekretaris Camat	Sekcam
RSKMJ11	Gaji dan Tunjangan ASN Tidak Dibayarkan Tepat Waktu disebabkan oleh Keterlambatan SPD	Mitigasi	Koordinasi antara Bagian Keuangan dengan BPKAD terkait penyediaan SPD Gaji dan tunjangan															Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Sekretaris, Kasubag Umum Ketatalaksanaan dan kepegawaian dan Kasubag Penyusunan Program dan keuangan
RSKMJ12	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terhambat disebabkan oleh Terjadi Kesalahan dan Ketidaksesuaian Dikertas Kerja Rekonsiliasi Aset dan Realisasi Keuangan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan agar melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin															Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan serta Pengurus Barang	Sekretaris dan Kasubag Program dan keuangan
RSKMJ13	Hasil Pemeriksaan tidak/terlambat ditindaklanjuti disebabkan oleh Terjadi Keterlambatan Dalam Mengumpulkan, Menghimpun dan Menyusun laporan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada pelaksana kegiatan untuk menyerahkan semua data yang dibutuhkan tepat waktu															Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Sekretaris dan Kasubag Program dan keuangan
RSKMJ14	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terhambat disebabkan oleh Terjadi Keterlambatan Dalam Mengumpulkan, Menghimpun dan Menyusun laporan	Mitigasi	Instruksi Camat kepada pelaksana kegiatan untuk membuat rekapitulasi/laporan realisasi pembayaran tepat waktu															Sekretaris dan Kasubag Program dan keuangan	Sekretaris dan Kasubag Program dan keuangan

RKMJ06	Tidak Lengkapnya Dokumen Pengadaan dan Dokumen Pendukung	Mitigasi	Pengurus Barang Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen dan Barang Sebelum Dilakukan Pencatatan															Sekretaris Camat	Sekcam
RSKMJ15	Pengamanan Aset tidak terlaksana disebabkan oleh Kurang koordinasi antara PPK Barang dan Pengurus Barang	Mitigasi	Instruksi Camat kepada PPTK, PPK Barang dan Pengurus Barang															Kasubag UKK dan Pengurus barang	Kasubag UKK dan Pengurus barang
RSKMJ16	Penatausahaan BMD Tidak Maksimal disebabkan oleh Terjadi Kurang Entry BMD Pada Simda BMD	Mitigasi	Monitoring dan Evaluasi dari Camat															Kasubag UKK dan Pengurus barang	Kasubag UKK dan Pengurus barang
RKMJ07	Dokumen Pendukung Tidak Lengkap	Mitigasi	Evaluasi Sumber Daya Manuasia yang ada sebelum peaksanaan kegiatan															Sekretaris Camat	
RSKMJ17	Kegiatan tidak dilaksanakan/mutu pelaksanaan rendah disebabkan oleh Sapras yang disediakan tidak sesuai kebutuhan / mutu rendah	Mitigasi	1. Laporan Bulanan Pegawai; 2. Surat Teguran bagi ASN yang melanggar disiplin pegawai															Kasubag UKK	Kasubag UKK
RSKMJ18	Kegiatan tidak dilaksanakan/mutu pelaksanaan rendah disebabkan oleh 1. Kekurangan anggaran; 2. Kegiatan tidak terlaksana	Mitigasi	Surat tugas kepada pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Diklat															Kasubag UKK	Kasubag UKK
RSKMJ19	Kegiatan tidak dilaksanakan/mutu pelaksanaan rendah disebabkan oleh 1. Kekurangan anggaran; 2. Kegiatan tidak terlaksana	Mitigasi	Menyampaikan undangan kepada calon peserta															Kasubag UKK	Kasubag UKK
RSKMJ20	Kegiatan tidak dilaksanakan/mutu pelaksanaan rendah disebabkan oleh 1. Kekurangan anggaran; 2. Kegiatan tidak terlaksana	Mitigasi	Surat tugas kepada pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Diklat															Kasubag UKK	Kasubag UKK
RKMJ08	Tidak Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Mitigasi	Dilakukan Evaluasi terkait pagu anggaran dengan Standar Harga															Sekretaris Camat	
RSKMJ21	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan															Kasubag Umum	Kasubag Umum
RSKMJ22	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan															Kasubag Umum	Kasubag Umum
RSKMJ23	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan															Kasubag Umum	Kasubag Umum
RSKMJ24	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan															Kasubag Umum	Kasubag Umum
RSKMJ25	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan															Kasubag Umum	Kasubag Umum
RSKMJ26	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan															Kasubag Umum	Kasubag Umum
RSKMJ27	Barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan oleh Identifikasi kebutuhan barang tidak tepat	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan															Kasubag Umum	Kasubag Umum
RSKMJ28	Kunjungan tamu tidak terjadwal disebabkan oleh Kurangnya koordinasi lintas sektoral	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan															Kasubag Umum	Kasubag Umum
RSKMJ29	Hasil rapat koordinasi tidak maksimal disebabkan oleh Yang hadir dalam rapat koordinasi tidak sesuai tupoksi	Mitigasi	Nota dinas dari Camat ke seluruh ASN															Seluruh ASN	Seluruh ASN
RSKMJ30	SDM yang menangani kearsipan belum memiliki kompetensi yang cukup disebabkan oleh Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak maksimal	Mitigasi	Uusulan ke BKPSDM untuk pelatihan kearsipan															Kasubag UKK	Kasubag UKK
RSKMJ31	SDM yang menangani Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD belum memiliki kompetensi yang cukup disebabkan oleh Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tidak amksimal	Mitigasi	Uusulan ke BKPSDM untuk pelatihan kearsipan															1. Kasi Kesra selaku PPTK Rutin/operasional; 2. PPTK Kelurahan	Kasubag UKK

RKMJ09	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tertunda disebabkan oleh Waktu Penyelesaian Tidak Cukup	Mitigasi	Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian														Sekretaris Camat	Sekretaris Camat
RSKMJ32	Terdapat beberapa surat/korespondensi yang tidak dapat dilengkapi dengan materai disebabkan oleh Persediaan materai kurang	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan														Kasubag Umum	Kasubag Umum
RSKMJ33	Tidak terbayarnya tagihan air, listrik dan wifi kantor disebabkan oleh Kurang anggaran	Mitigasi	Nota dinas ke Kasuba Umum untuk melakukan identifikasi kebutuhan														Kasubag Umum	Kasubag Umum
RSKMJ34	Data terkait kehadiran THL terlambat disampaikan disebabkan oleh Petugas pengumpul data terlambat menyelesaikan tugas	Mitigasi	Nota dinas ke Kasubag Kepegawaian untuk melakukan pengumpulan daftar hadir tepat waktu														Kasubag Kepegawaian	Kasubag Kepegawaian
RKMJ10	Lemahnya Pengawasan Dan Tidak Adanya Lembar Control Aset Yang Dipelihara	Mitigasi	Membuat Lembar Control Penjagaan Perawatan Aset															Kasubag UKK
RSKMJ35	Kelalaian pembayaran pajak kendaraan operasional disebabkan oleh Pembayaran pajak tidak terjadwal	Mitigasi	Nota dinas ke pengurus barang untuk membuat jadwal pembayaran pajak kendaraan jabatan														Pengurus barang	Pengurus barang
RSKMJ36	Pemeliharaan tidak terlaksana disebabkan oleh Kurang anggaran	Mitigasi	Nota dinas ke Bagian Penyusunan Program dan Keuangan untuk menambah anggaran pemeliharaan alat berat														Kasubag Program dan Keuangan	Kasubag Program dan Keuangan
RSKMJ37	Peralatan kantor tidak berfungsi dengan baik disebabkan oleh Tidak terdapat jadwal khusus untuk pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Mitigasi	Nota dinas ke Pengurus Barang untuk melakukan penjadwalan pemeliharaan alat kantor														Pengurus barang	Pengurus barang
RSKMJ38	aset tetap lainnya tidak berfungsi dengan baik disebabkan oleh Tidak terdapat jadwal khusus untuk pemeliharaan aset tetap lainnya	Mitigasi	Nota dinas ke Pengurus Barang untuk melakukan penjadwalan pemeliharaan aset tetap lainnya														Pengurus barang	Pengurus barang
RSKMJ39	Pemeliharaan tidak terlaksana disebabkan oleh Kurang anggaran	Mitigasi	Nota dinas ke Bagian Penyusunan Program dan Keuangan untuk menambah anggaran pemeliharaan gedung kantor														Kasubag Program dan Keuangan	Kasubag Program dan Keuangan

h. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko

Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pelaksanaan Pengendalian Risiko Strategis Tahun 2023

No	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Tanggal Pelaksanaan	Keterjadian Risiko (Ya/Tidak)	Bentuk Output Kegiatan pengendalian (No Surat/No	Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian/ Risiko Sisa yang belum dapat dikendalikan
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan penyampaian usulan Diklat dan Bimtek untuk peningkatan kompetensi SDM PATEN		Tidak	-	Jadwal kegiatan belum tersedia dari instansi etrkait
	Usul kebutuhan sarana dan prasarana dalam RKBMD/RKPBMD		Tidak	RKBMD/RKPBMD APBD-P 2024	Menunggu jadwal perencanaan dan penganggaran APBD-Perubahan
	Usul kebutuhan pasokan logistik kepada OPD Pengampu		Tidak	Usulan pengadaan barang dan/atau kegiatan	Menunggu jadwal perencanaan dan penganggaran APBD-Perubahan
	Koordinasi antar instansi terkait sosialisasi dan penanganan trantibum di Kecamatan		Tidak	-	

i. Progres Capaian Sasaran Strategis

Progres Capaian indikator sasaran strategis Kecamatan Muara Jawa sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Tabel
Capaian Indikator Sasaran Strategis

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024		Realisasi Target		% Capaian
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	65	55.510.133.877	-	-	-
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84	33.701.339.867	-	-	

Lampiran Laporan Pengelolaan Risiko Eselon IV

Daftar Dokumen Hasil Pelaksanaan RTP Risiko

No	Kode Risiko.	Nama Dokumen Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan Pengendalian
1	2	3	4
1		Usulan kebutuhan barang dari Bagian PATEN, PPID, dan SIAK	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan dan PPTK
2		Hasil verifikasi Kecamatan terhadap usulan masyarakat di aplikasi SIPD	Kasi PMD
3		Surat Instruksi Camat untuk percepatan realisasi anggaran	Seluruh Kasi, Kasubag, PPTK dan Lurah
4		Surat Instruksi Camat untuk penyampaian Lpaoran UPR TW 2 Tahun 2024	Seluruh Kasi, Kasubag, PPTK
5		Surat usulan pergeseran anggaran kas dan rekening belanja gaji Tahun 2024	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Pengelolaan Risiko UPR Eselon III Kecamatan Muara Jawa Triwulan II Tahun 2024 disusun dan disampaikan sebagai bahan masukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Muara Jawa

Penanggungjawab UPR Esselon III

Camat Muara Jawa



MUHAMMAD RAMLI.,S.E.,M.M.

Pembina /IV.a

Nip. 19750604 200012 1 003